



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8515-8525

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Sistem Informasi Pengawasan Itjen TNI Sebagai Teknik Audit Berbantu Komputer Pada Kegiatan Pengawasan Di Lingkungan TNI

Alif Kausar^{1✉}, Yuliantini², Agung Setiawan³

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

Email : mayoralif19@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pengendalian intern dirancang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai ketentuan. Fungsi utama pengendalian intern adalah mengidentifikasi dan mengoreksi deviasi dari rencana yang telah ditetapkan, dengan pengendalian yang bersifat preventif atau deduktif. Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan program yang didukung anggaran negara, menerapkan prinsip Ketertiban, Kepatuhan, Efektif, Efisien, dan Ekonomis (2K3E). APIP berperan sebagai Quality Assurance, Consulting Partner, dan Early Warning System dengan pendekatan audit berbasis manajemen risiko. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Itjen TNI telah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Itjen TNI (SIPI) yang dirancang untuk memberikan informasi yang valid, cepat, dan akurat. SIPI membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan melalui Teknik Audit Berbantu Komputer (TABK). Penerapan teknologi ini penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan tata kelola di lingkungan TNI, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, Pengawasan, Teknik Audit, Komputer*

Abstract

The problem of accessibility to assistive devices for people with disabilities is still a major challenge in Indonesia. The Social Service is one of the parties tasked with providing information and facilitating public access to service programs for the distribution of assistive devices for people with disabilities. Strategy is communication that is very important in the success of a program. This research aims to determine the communication strategy of the South Tangerang Social Service in the service program for distributing disability aids. The method used is qualitative descriptive. Data collection techniques include interviews, documentation and literature study. The research results show that the communication strategy used by the South Tangerang Social Service involves systematic and collaborative stages. The systematic communication strategy stages carried out start from research, planning, implementation, evaluation and reporting. Apart from that, the communication strategy in this program is also collaborative in nature, involving cooperation with various parties at the RT, RW, Village, District and social institutions such as Pertuni.

Keyword: *Communication Strategy, Social Services, Persons with Disabilities*

PENDAHULUAN

Pengendalian internal dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya, fungsi pengendalian internal bertujuan untuk mendeteksi adanya deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan korektif. Pengendalian internal dapat berupa pengendalian preventif, yaitu perancangan sistem pengendalian, atau pengendalian deduktif untuk mengatasi penyimpangan yang sudah terjadi. Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai komponen utama sistem pertahanan negara, dalam pelaksanaan program kegiatan yang didukung oleh anggaran negara, diharapkan dapat menerapkan prinsip Ketertiban, Kepatuhan, Efektif, Efisien, dan Ekonomis (2K3E).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau pengawas internal pada lembaga pemerintah adalah pihak yang melakukan pengawasan melalui audit, tinjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. APIP di TNI, yakni Inspektorat Jenderal TNI (Itjen TNI), bertugas membantu Panglima TNI dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait efektivitas, efisiensi, kepatuhan hukum, dan ketertiban dalam pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, pembangunan kekuatan TNI, serta pengelolaan perbendaharaan di lingkungan TNI untuk mendukung tugas pokok TNI. Itjen TNI sebagai APIP di lingkungan TNI merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen pemerintah untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan birokrasi yang bersih (Clean Government). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, anggaran, dan kegiatan di lingkungan TNI sesuai dengan prinsip 2K3E, dilakukan audit sebagai bagian dari pengawasan internal oleh Itjen TNI sebagai APIP di lingkungan TNI.

Paradigma Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance), mitra konsultasi (Consulting Partner) maupun sebagai pencegah dini terjadinya penyimpangan (Early Warning System), perubahan pola audit yang menggunakan pendekatan audit berbasis manajemen risiko. Fungsi APIP sebagai Early Warning System dan Quality Assurance melalui upaya pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan peran APIP di lingkungan TNI, harus mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai (Quality Assurance) atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok TNI;
2. Memberikan peringatan dini (Early Warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas pokok TNI;
3. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi (Consulting Partner) guna memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas pokok TNI; dan
4. Melaksanakan komunikasi, koordinasi (Communication, Coordinating) dan kerja sama dengan lembaga pengawasan internal dan eksternal TNI.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirancang untuk mendorong dan mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan proses pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Kemajuan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membuka peluang untuk membangun sistem pengawasan yang lebih modern dan efektif. Pada tahun 2018, Itjen TNI mengembangkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi untuk kegiatan pengawasan, sesuai dengan amanat "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", yang mengharuskan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Sistem Informasi Pengawasan Itjen TNI (SIPI) dikembangkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penggunaan sistem informasi berbasis komputer menjadi sangat penting untuk meningkatkan keandalan dan akurasi data yang dihasilkan. Dalam praktik akuntansi, informasi yang relevan, tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami adalah tujuan dari penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer (Sumarsana, 2013). Dibandingkan dengan pengolahan data manual, sistem informasi berbasis komputer memiliki keunggulan dalam memproses data dengan lebih

cepat dan mudah, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan informasi dalam waktu yang lebih singkat.

SIPI merupakan pengembangan dari E-Monitoring Kementerian PUPR yang kemudian dikembangkan oleh Tim Itjen TNI untuk memperoleh data yang valid dan cepat serta akurat untuk mewujudkan fungsi APIP yang akuntabel, cepat dan transparan. Kelebihan SIPI sebagai salah satu alat bantu dalam kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Informasi secara Real Time karena berbasis web sehingga tidak memerlukan instalasi aplikasi.
2. Dapat menampilkan data anggaran (Pagu, Daya Serap dan realisasi penggunaan anggaran) yang tersaji dalam bentuk diagram kurva "S".
3. Monitoring pengadaan barang dan jasa yang terhubung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4. Keamanan data terjamin karena Server SIPI di Pusinfo TNI.
5. Dapat menampilkan Anggaran dari UO Mabes TNI, UO Mabes TNI AD, UO Mabes TNI AL dan UO Mabes TNI AU beserta Satker-Satker dibawahnya.

Penggunaan aplikasi SIPI ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Teknik audit berbantuan komputer dengan menggunakan SIPI merupakan instrumen yang penting dan bermanfaat bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak hanya mendukung dan mempermudah hal dalam analisa tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia. SIPI sebagai Early Warning System (EWS) yang mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah atau ancaman yang muncul agar dapat dilaksanakan deteksi dini dan pencegahannya.

Dalam kegiatan pengawasan data dari SIPI digunakan untuk menentukan sasaran pengawasan, entitas dan merumuskan temuan awal dalam desk audit. Auditor mendapatkan data-data tentang program dan kegiatan entitas terpilih dan memetakan risiko-risiko potensial dari entitas tersebut yang selanjutnya dirumuskan menjadi temuan awal dari kegiatan audit. Perumusan temuan awal tersebut menentukan kualitas dari hasil audit yang dilaksanakan. Penggunaan SIPI dalam kegiatan pengawasan berdampak besar terhadap mutu dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Itjen TNI. Berdasarkan hasil telaah seawat eksternal oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada tahun 2022, praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal TNI memperoleh nilai kesesuaian sebesar 88% terhadap standar, yang termasuk dalam kategori "Baik." Ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern Itjen TNI telah sesuai dengan standar. Tata kelola, praktik profesional,

dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern.

Penggunaan komputer dalam pelaksanaan audit dikenal sebagai Teknik Audit Berbantu Komputer (TABK). TABK adalah proses audit yang memanfaatkan teknologi komputer untuk melakukan pengawasan. Terdapat situasi di mana auditor perlu mempertimbangkan penggunaan TABK, terutama ketika tidak ada dokumen masukan atau jejak audit (Audit Trail). Keberhasilan TABK bergantung pada kemampuan auditor untuk menerima dan memahami cara kerja sistem tersebut dalam proses audit. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman auditor terhadap teknologi tersebut (Prasita dan Priyo, 2007). Penggunaan SIPI membutuhkan auditor-auditor yang berkompentensi sebagai Auditor TIK atau sudah mengikuti diklat teknis substantif Audit Berbantuan Komputer dari Pusdiklatwas BPKP, namun jumlah auditor yang sudah berkualifikasi auditor TIK di Itjen TNI masih sangat terbatas.

SIPI harus dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi, sebaik apapun aplikasi jika tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi maka aplikasi tersebut akan sia-sia. Dalam pemanfaatan aplikasi perlu didukung sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Teknologi adalah bagian integral dari sebuah organisasi dan menjadi salah satu elemen penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang menguasai dan mampu mengoperasikan SIPI untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan suatu organisasi. Keterkaitan antara sumber daya manusia dan aplikasi SIPI sangat erat, sehingga dibutuhkan tenaga yang kompeten dan mampu menguasai aplikasi SIPI agar pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dapat berjalan dengan optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang sesuai untuk pendekatan kualitatif ini adalah penelitian deskriptif atau eksploratif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau kelompok secara mendetail dan menyeluruh. Sementara itu, penelitian eksploratif dilakukan ketika pengetahuan tentang suatu topik masih terbatas atau belum banyak diketahui, sehingga peneliti berusaha mendapatkan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh langsung dari Itjen TNI atau pihak terkait lainnya yang terlibat dalam kegiatan pengawasan. Data sekunder akan mencakup dokumen resmi seperti

undang-undang, regulasi terkait pengawasan, laporan penelitian sebelumnya, dan artikel ilmiah yang relevan.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan pengawasan oleh Itjen TNI, termasuk kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan personel Itjen TNI yang bertugas sebagai tim perancang audit, ketua tim audit, dan auditor Itjen TNI.

Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis secara tematis atau menggunakan analisis konten, dengan fokus pada pola-pola, tema utama, dan perbedaan dalam pandangan atau pengalaman yang terungkap selama wawancara dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek penting dalam kegiatan pengawasan Itjen TNI secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan Tim perancang Audit, Ketua Tim Audit dan Auditor Itjen TNI mengungkapkan beragam aspek terkait penggunaan SIPI, kemampuan SIPI dan Penggunaan yang diharapkan dalam pelaksanaan audit sebagai berikut:

1. Penggunaan SIPI terbatas untuk Auditor Itjen TNI yang mendapatkan otorisasi berupa password dan username. Dengan menggunakan SIPI maka proses pengumpulan data menjadi lebih cepat karena didalam aplikasi SIPI sudah mendapatkan data-data tentang daya serap anggaran, DIPA Satker dan laporan pengadaan barang/jasa. Proses pengumpulan data ini penting karena sebagai bahan penyusunan Program Kerja Audit (PKA) dan Kertas Kerja Audit (KKA), namun penggunaan SIPI masih mempunyai hambatan yaitu terbatasnya kemampuan Auditor Itjen TNI yang tidak memiliki kompetensi bidang keuangan dan minimnya kemampuan literasi aplikasi.
2. Kemampuan SIPI dalam pelaksanaan kegiatan audit. Data SIPI dapat digunakan dalam penentuan Entitas Audit, dalam pertimbangan risiko-risiko dari Satker terpilih dan juga Satker mana yang berpotensi menjadi temuan dari auditor Eksternal. Data dari SIPI dapat menjadi salah satu indikator dalam merumuskan temuan antara lain daya serap yang rendah sehingga berpotensi terjadinya keterlambatan, biasanya terkait belanja Modal. Selanjutnya Auditor dengan kompetensinya mendalami pengadaan barang/jasa tersebut mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan yang disesuaikan dengan Kontrak pengadaan, Namun masih terdapat temuan dari BPK terkait atas keterlambatan pengadaan barang/jasa dan potensi kemahalan harga. Hal ini menunjukkan bahwa

aplikasi SIPI belum dapat mengidentifikasi keterlambatan penerimaan hasil pengadaan yang sesuai dengan kontrak pengadaan. Data aplikasi SIPI berasal dari hasil rekap pembayaran dari OMSPAN dan belum dapat mengidentifikasi adanya potensi kemahalan harga.

3. Penggunaan SIPI yang diharapkan dalam pelaksanaan audit. Data dari SIPI masih harus diolah oleh auditor, dalam hal temuan yang berkualitas merupakan kemampuan dari auditor untuk menghasilkan temuan yang berkualitas dan rekomendasi yang tepat kepada Entitas. Penyajian data dari SIPI sudah dapat menjadikan Early Warning System kepada para Kasatker dalam memonitor penyerapan anggaran sehingga dapat mencegah terjadinya penyerapan anggaran yang lintas tahun. Data dari SIPI diharapkan sudah terhubung dengan data dari aplikasi SAKTI dan LKPP sehingga dapat memonitor proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan (Outcome) tidak hanya sampai serah terima barang/jasa. Selain itu dalam organisasi pengawak SIPI membutuhkan kompetensi Auditor bidang teknologi informasi.

Tabel 1. Resume Hasil Wawancara

No	Topik Wawancara	Pertanyaan Utama	Jawaban Utama
1.	Penggunaan SIPI	Siapa saja yang diberikan akses username SIPI	yang mendapatkan otorisasi adalah seluruh Pamen dalam hal ini Inspektur Muda, Madya dan Utama, untuk Irbidang juga mendapatkan akses username
		Bagaimana penggunaan SIPI dalam proses pengumpulan data pada saat pelaksanaan deskaudit	Proses pengumpulan data menjadi lebih cepat karena didalam aplikasi SIPI sudah mendapatkan data-data tentang daya serap anggaran, DIPA Satker dan laporan pengadaan barang/jasa.
		Hambatan apa saja yang selama ini terjadi	terbatasnya kemampuan Auditor Itjen TNI yang memiliki background bukan personel bidang keuangan dan minimnya kemampuan literasi aplikasi.
2.	Kemampuan SIPI dalam pelaksanaan kegiatan audit	Apakah data yang disajikan oleh SIPI digunakan pada saat penentuan Entitas	Data SIPI dapat digunakan dalam penentuan Entitas Audit, dalam pertimbangan risiko-risiko dari Satker terpilih dan juga Satker mana yang berpotensi menjadi

No	Topik Wawancara	Pertanyaan Utama	Jawaban Utama
			temuan dari auditor Eksternal.
		Bagaimana merumuskan temuan awal berdasarkan data awal yang diperoleh dari SIPI	Data dari SIPI dapat menjadi salah satu indikator dalam merumuskan temuan antara lain daya serap yang rendah sehingga berpotensi terjadinya keterlambatan, biasanya terkait belanja Modal. Selanjutnya Auditor dengan kompetensinya mendalami pengadaan barang/jasa tersebut mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan yang disesuaikan dengan Kontrak pengadaan.
		Apakah terdapat temuan yang ditemukan oleh auditor eksternal namun belum teridentifikasi oleh APIP itjen TNI	Temuan dari BPK terkait atas keterlambatan pengadaan barang/jasa dan potensi kemahalan harga.
		Apakah data yang disajikan oleh SIPI dapat menghasilkan temuan yang berkualitas	data dari SIPI masih harus diolah oleh auditor, dalam hal temuan yang berkualitas merupakan kemampuan dari auditor untuk menghasilkan temuan yang berkualitas dan rekomendasi yang tepat kepada Entitas.
3.	Penggunaan SIPI yang diharapkan dalam pelaksanaan audit	Bagaimana peringatan dini oleh SIPI yang diharapkan	penyajian data sudah dapat menjadikan early warning system kepada para Kasatker dalam memonitor penyerapan anggaran sehingga dapat mencegah terjadinya anggaran yang lintas tahun
		Bagaimana pembinaan kompetensi APIP itjen TNI dalam meningkatkan kompetensi auditor di bidang teknologi	Pengolahan data dalam SIPI dapat optimal apabila personel pengawak SIPI dan Auditor memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi.

No	Topik Wawancara	Pertanyaan Utama	Jawaban Utama
		informasi	Pembinaan kompetensi APiP dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan terkait Aplikasi Sakti dan Auditor TIK

Dari analisis hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPI sebagai teknik audit berbantu komputer sangat mendukung kegiatan pengawasan. Penggunaan SIPI merupakan instrumen yang penting dan bermanfaat bagi auditor dalam melaksanakan tugas sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan SIPI memudahkan auditor dalam analisa risiko dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia.

Pengembangan keterampilan auditor dalam menggunakan teknologi informasi menjadi kunci. Auditor harus memahami sistem teknologi informasi yang mereka audit, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak audit dan alat analisis data yang diperlukan. auditor dapat mengintegrasikan teknologi informasi secara efektif dalam proses audit untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi hasil audit.

SIPI sebagai EWS (Early Warning System) atau Sistem peringatan dini sebagai sistem yang terdiri dari definisi akurat mengenai suatu hal, dan mekanisme mengenai prediksi yang tepat pada hal tersebut. Sistem peringatan dini ini digunakan pada hal-hal yang tidak dapat diprediksi namun memiliki dampak yang signifikan terhadap institusi. EWS berupa sistem monitoring yang real time, mudah digunakan dan mudah dianalisa sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki sistem pengawalan operasional terhadap integrasi sistem aplikasi yang ada saat ini secara efektif dan efisien dengan harapan sebelum permasalahan terjadi akan diketahui lebih awal.

SIMPULAN

Peran auditor sebagai *Early Warning System* mengacu pada penggunaan sistem yang didesain untuk mendeteksi potensi risiko atau masalah yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional, keuangan, atau reputasi suatu organisasi secara dini. Sistem ini harus dapat meningkatkan knowledge, attitude dan practice dari tiap komponen yang ada dalam sistem tersebut. Syarat utama agar peringatan dini ini dapat berhasil efektif, diperlukan komitmen pribadi dan aksi nyata dari tiap individu/institusi dan komunikasi yang baik antar individu yang terlibat. Keberhasilan SIPI tergantung dari kemampuan auditor untuk dapat menerima sebuah sistem dan memahami bagaimana cara penggunaannya

dalam kegiatan audit. Penerapan teknologi dalam kegiatan audit dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2021). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta.
- Darono, A. (2010). Teknik berbantuan komputer: Menelaah kembali kedudukan dan perannya. *Jurnal Sistem Informasi Institut Teknik Surabaya*.
- Faiz, I., & Mukhlis. (2015). *Audit Internal*. Yogyakarta.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1090/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1400/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Doktrin Pengawasan Intern Tentara Nasional Indonesia.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Nova, K. (2011). Penerapan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pickett, S. (2010). *The Internal Auditing Handbook* (3rd ed.). Jennifer M: United Kingdom.
- Randal, M., & Arens, A. (2003). *Auditing and Assurance, An Integrated Approach* (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
- Sawyer, Dittenhofer, S., & Cheiner. (2005). *Internal Auditing* (D. Adhariani, Trans.; 5th ed., Vol. 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.